

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 26 Desember 2014

Subyek : Pencemaran

Hal : 23

Tata Kelola Tidak Transparan

Masyarakat Terkena Dampak Pencemaran

Jakarta, Kompas Keterbukaan informasi pengelolaan lingkungan amat minim. Padahal, menurut undang-undang, publik berhak mengakses informasi itu, apalagi tata kelola lingkungan terkait mutu hidup warga. Keterbukaan informasi memacu pemerintah membenahi pengelolaan lingkungan.

Menurut peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Rika Fajrini, saat dihubungi, Kamis (25/12), di Jakarta, dalam penelitian ICEL tahun ini, keterbukaan informasi tentang pengelolaan lingkungan masih amat rendah.

"Tahun ini pemerintah masih melanggar Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), termasuk sektor pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam," kata Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo dalam Catatan Akhir Tahun Hukum Lingkungan Hidup 2014 "Menyongsong Perlindungan Lingkungan Hidup Lebih Baik: 17 Pekerjaan Rumah Pemerintah Jokowi-JK", Selasa, di Jakarta.

Henri mengatakan, UU KIP disahkan pada 2008 dan seharusnya sudah berjalan dua tahun kemudian. Dalam masa dua tahun itu, badan publik diberi waktu, antara lain, untuk menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta prosedur operasi standar. Namun, menurut data Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 1 Juli, dari 694 badan publik dari tingkat nasional hingga kota/kabupaten, hanya 47,98 persen di antaranya yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pemerintah daerah

Kepala Divisi Pembaruan Hukum dan Kebijakan ICEL Dessy Eko Prayitno menjelaskan, PPID yang ada pun belum menjamin keterbukaan informasi publik. Di sektor kehutanan, dalam penelitian ICEL di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur (sebelum dipisah dengan Kalimantan Utara), dan Sumatera Selatan, tingkat transparansi pemerintah daerah amat rendah, yakni hanya bernilai 15,64 pada rentang 0-100.

"Minimnya transparansi pemda berkorelasi dengan angka kerusakan hutan di kota/kabupaten," ucap Eko. Semakin pemda tak transparan, kian tinggi angka kerusakan hutan.

Ia mencontohkan, menurut data Forest Watch Indonesia tentang perubahan tutupan hutan pada 2009-2013, angka deforestasi Kabupaten Berau 113.233 hektar dan Kabupaten Ketapang 88.296 ha. Berdasarkan studi indeks kelola hutan dan lahan (IKHL) ICEL 2014, kedua kabupaten itu masuk kategori buruk. Berau memiliki nilai 7,07 dan ketapang 10,30. Namun, dari nilai keduanya terlihat makin tinggi nilai IKHL, kian kecil area hutan yang rusak.

Hubungan transparansi dengan masalah lingkungan juga tampak dari pencemaran sungai. Peneliti ICEL, Rika Fajrini, mengatakan, dalam penelitian ICEL tahun ini, keterbukaan informasi masih amat rendah bagi masyarakat di Sungai Asahan di Sumatera Utara, Sungai Ciujung di Banten, dan Kali Surabaya di Surabaya, Jawa Timur. Ketiga sungai tersebut diduga tercemar limbah dari pabrik pulp dan kertas.

Hal itu berdampak antara lain masyarakat kekurangan air bersih, sakit setelah menggunakan air sungai, dan matinya ikan-ikan di sungai untuk tambak. "Karena itu, masyarakat ingin mendapat informasi terkait dengan tingkat pencemaran sungai ataupun informasi terkait perusahaan di sekitar sungai serta kewajiban perusahaan bagi lingkungan," katanya.

Dalam riset tersebut terungkap, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) di setiap daerah terkendala dalam menyalurkan informasi-informasi itu. Instansi pemerintah tersebut tak tahu cara memublikasikannya, data terpencah, atau sama sekali belum memiliki data. Namun, ada juga daerah yang enggan menginformasikan dengan alasan takut dimanfaatkan untuk persaingan bisnis tak sehat.

Tantangan lain adalah otonomi daerah membuat daftar informasi publik (DIP) terkait lingkungan di daerah tak selengkap acuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rika mengatakan, BPLHD ada di bawah aturan pemerintah kabupaten/kota sehingga DIP kementerian tidak bisa langsung diterapkan jika belum disertakan dalam peraturan daerah. (JOG)